



KLAIM TAGIHAN RS JOGJA TAK KUNJUNG CAIR

BPJS: Kami Bayar Bertahap, Mohon Sabar

UMBULHARJO (MERAPI) - Operasional dan pelayanan kepada pasien di rumah sakit milik Pemkot Yogyakarta, yakni RS Jogja, terancam terganggu. Pasalnya pembayaran klaim tagihan jaminan kesehatan nasional Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ke rumah sakit itu terlambat.

'Keterlambatan pembayaran klaim BPJS ke rumah sakit sudah sejak Oktober 2017. Mungkin bagi BPJS terlambat tiga pekan tidak masalah. Tapi bagi kami keterlambatan itu cukup mengganggu operasional dan layanan ke pasien,' kata Direktur Utama RS Jogja Tuty Setyowati usai rapat koordinasi dengan Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Rabu (28/2). Dia menyatakan, sudah tiga berita acara pencairan klaim

BPJS di RS Jogja dengan total sekitar Rp 23,2 miliar telah diserahkan ke BPJS. Tiga berita acara klaim itu terdiri atas klaim senilai Rp 9,7 miliar diajukan 25 Januari 2018, klaim sekitar Rp 4,5 miliar diajukan 31 Januari 2018 dan klaim sekitar Rp 9 miliar diajukan 28 Februari 2018.

'Satu berita acara pencairan klaim, kabarnya akan dibayarkan,' imbuhnya. Menurut Tuty, sebelumnya

pembayaran klaim BPJS ke RS Jogja tidak mengalami keterlambatan. Namun sejak Oktober 2017 terlambat. Pihaknya menyadari dalam pembayaran klaim tagihan ke BPJS Kesehatan di daerah juga tergantung transfer dari pusat. Namun dia berharap pembayaran bisa tepat waktu karena selama ini 90 persen pasien yang berobat di RS Jogja adalah peserta BPJS Kesehatan.

Dampak lainnya pada pemenuhan kebutuhan obat dan alat medis. Dia menyebut RS Jogja memiliki utang pembelian obat sekitar Rp 10 miliar. Jika klaim pertama dibayarkan, masih belum cukup untuk membayar utang obat itu.

'Tentu akan kami bagi sesuai

kebutuhan. Mungkin belum akan kami lunasi. Yang bisa kami lakukan sementara hubungi distributor obat agar tak menghentikan distribusi tapi tetap pasti akan dibayar,' ucap Tuty.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta Antonius Fokki Ardiyanto menilai dengan kondisi yang dialami RS Jogja juga berpotensi terjadi di rumah sakit lain. Untuk itu pihaknya bersama pihak RS Jogja dan dinas terkait pekan depan akan menemui BPJS Kesehatan pusat dan Kementerian Keuangan. Dewan juga mengusulkan ada dana cadangan yang dimiliki rumah sakit untuk mengantisipasi keterlambatan pembayaran klaim BPJS kese-

hatan.

'Kalau keterlambatan ini berlarut-larut, bisa terjadi darurat pelayanan kesehatan karena warga tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan secara maksimal,' tegas Fokki.

Secara terpisah Kepala BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta Dwi Hesti Yuniarti mengutarakan, BPJS siap membayar klaim ke rumah sakit secara bertahap. Mekanisme pembayaran bertahap, lanjutnya, sudah disepakati dalam pertemuan dengan Dinas Kesehatan DIY. Pihaknya mengaku sampai kemarin sudah membayar klaim rumah sakit jatuh tempo pada 15 Februari. 'BPJS siap membayar secara bertahap. Mohon sabar,' ujarnya.

(Tri)-a

Tindak Lanjut

Untuk Ditanggapi

Untuk Diketahui

Jumpa Pers

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|--------------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. RSUD (RS Jogja) | Netral | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 30 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005